

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang telah menggantikan era orde baru tentunya berpengaruh pada sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi otonomi daerah (desentralisasi). Hal tersebut ditandai dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang telah diperbaharui menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah dalam sistem pemerintahan otonomi telah diatur secara desentralisasi sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintah. Pejabat Satuan Perangkat Kerja Daerah dilimpahkan kekuasaan oleh kepala daerah untuk merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, serta mengawasi atas pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan menteri/pimpinan, lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP RI No.60 Tahun 2008 tersebut tentunya berlaku juga terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan yang masuk kedalam Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam melayani masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga yang berperan dalam pelayanan pendidikan termasuk ke dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah yang mana tentunya memiliki peran dalam mengelola keuangan daerah yaitu mengelola dana pendidikan yang sudah dialokasikan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia demi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDA) yang bermartabat dan berintelektual.

Demi mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa Indonesia, pemerintah menerapkan program wajib belajar yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan pendanaan yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pada dasarnya BOS merupakan program pemerintah yang dicanangkan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajib belajar. Namun, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pada saat era reformasi saat ini anggaran pendidikan mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%, dan hal tersebut di nyatakan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional secara optimal dan baik.

Meski demikian, besarnya anggaran yang di alokasikan oleh pemerintah untuk dana pendidikan belum dapat menghasilkan SDM yang bisa bersaing pada persaingan global. Ini dibuktikan dengan rendahnya kualitas SDM Indonesia, antara lain diindikasikan dengan ranking Indonesia yang mana dalam penilaian (PISA). Posisi Indonesia ada di urutan 62 dari 69 negara. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa masih banyak persoalan untuk mengoptimisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen setiap tahunnya.

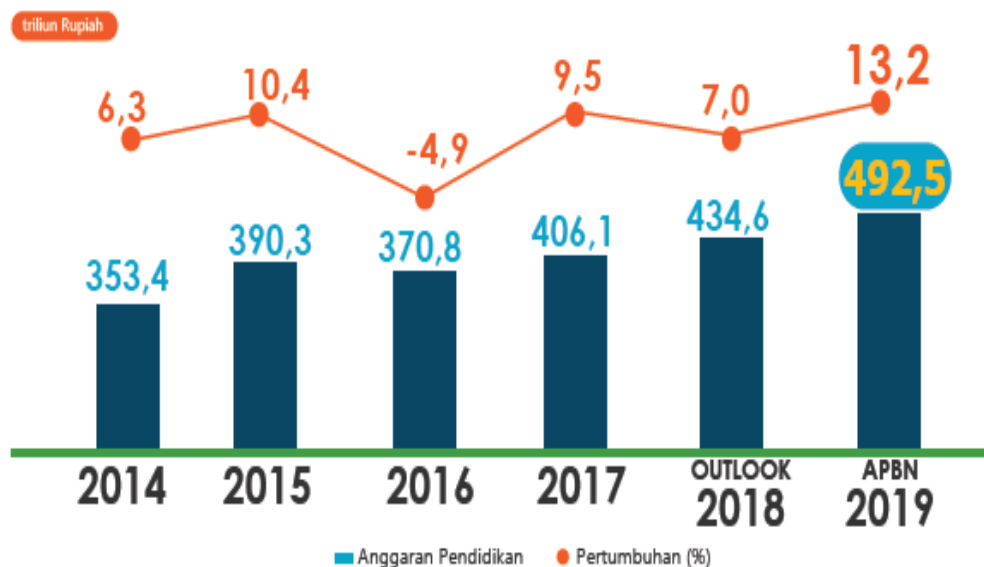
Fauzan Fadhlurrahman, 2019

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana BOS di Kota Serang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk APBN 2018 saja, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN itu meliputi anggaran sebesar Rp 440 triliun. (kumparan.com dikutip tanggal 19/3/2018).

Anggaran pemerintah untuk dana pendidikan tentunya tidak sedikit yang dikucurkan oleh pemerintah dengan kebijakan pemerintah yang mana dana pendidikan tetap dijaga sesuai dengan Undang-Undang yaitu sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan data grafik sebagai berikut :



Gambar 1.1

Sumber : kemenkeu.go.id

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dari tahun 2013-2018 mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 353,4 triliun meningkat pada tahun 2019 sebesar 492,5 triliun.

Fauzan Fadhlurrahman, 2019

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana BOS di Kota Serang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Didasarkan pada dana pendidikan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tentunya institusi pendidikan yang mengelola dana pendidikan khususnya dana BOS tentu harus dapat mengelolanya sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi yang terdapat pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003. Dengan terlaksananya ke empat prinsip tersebut tentunya pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh institusi pendidikan tata kelola keuangannya sudah terlaksana dengan baik.

UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Pendanaan Pemerintah sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya antara lain: 1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, 2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan, 3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public, 4) Pengalokasian dana pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas atau bermutu tentunya akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan juga dapat bersaing bukan hanya di kancah nasional melainkan pada kancah internasional. Mengenai peningkatan kualitas pendidikan tentunya memiliki beberapa faktor pendukung agar dapat tercapainya kualitas pendidikan yang baik, salah satunya yaitu dana pendidikan. Peran dana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tentunya sangat menentukan tercapai atau tidaknya proses pencapaian tujuan pendidikan, dan diperlukan kualitas laporan keuangan yang baik dalam pengelolaan laporan keuangan dana pendidikan terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara garis besar kualitas suatu laporan keuangan dibutuhkan suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan UU No.60 Tahun 2008 yang menjelaskan “SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Fauzan Fadhlurrahman, 2019

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana BOS di Kota Serang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Suatu pengelolaan keuangan terutama pada lembaga pendidikan dengan baik dan buruknya pengelolaan tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan pada lembaga tersebut. Dalam pengelolaan keuangan sekolah masyarakat juga ikut berperan serta sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kepercayaan publik atau masyarakat dalam pengelolaan dana pendidikan sangat terkait dengan perlunya menciptakan proses yang menjamin bahwa sumber daya publik digunakan dengan baik dan sesuai sebagaimana mestinya demi mewujudkan pendidikan yang baik. Proses tersebut tentunya memerlukan *good governance* terutama pada pengelolaan dana pada bidang pendidikan agar terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah-sekolah di seluruh Indonesia tentunya dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, juga mengevaluasi juga mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tersebut secara akuntabilitas dan transparan kepada masyarakat. Karena, pengelolaan dana yang baik pada pada sistem publik harus dilandasi akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja sekolah yang telah dibelanjakan dan digunakan. Tertuang pada UU No. 20 Tahun 2003 yaitu bahwasanya pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tentunya pihak yang mengelola dana pendidikan harus sesuai dengan keempat prinsip tersebut supaya menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

Sebagai lembaga yang bertugas pada pelayanan terutama pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah dengan statusnya yaitu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) bertanggung jawab kepada Pemerintah maupun masyarakat untuk

Fauzan Fadhlurrahman, 2019

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana BOS di Kota Serang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melaporkan pengelolaan keuangannya terutama pada dana BOS berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai peraturan pemerintah yang sudah diberlakukan

Dalam penggunaan dana BOS dapat terjadi penyimpangan yang dilakukan pada pihak-pihak yang mengelola dana BOS. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah yaitu ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas pihak sekolah (dalam hal ini Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah), kurangnya kontrol dari para pengawas sekolah (komite sekolah, UPT/Dinas Pendidikan), serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I tahun 2018 terdapat akun terbesar yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2017 yaitu, yang pertama adalah Aset Tetap pada 109 pemda, antara lain pencatatan aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan atau tidak akurat, pencatatan aset tetap dilakukan secara gabungan, dan penambahan nilai aset tetap tidak dikapitalisasi ke aset induk. Yang kedua adalah aset lancar pada 70 pemda, antara lain saldo dana BOS tidak dicatat dan disajikan pada neraca, penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara, piutang PBB-P2 tidak diverifikasi dan divalidasi, serta tidak didukung dengan data yang valid, dan piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Menurut Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Banten TA 2018 (banten.bpk.go.id dikutip tanggal 12/06/2019) yaitu dalam upaya terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, sehingga tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Diantara permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama salah satunya yaitu,

Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum tertib:

Fauzan Fadhlurrahman, 2019

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana BOS di Kota Serang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a) Rekening penerima dana BOS belum ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b) Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) untuk pengelolaan dana BOS;
- c) Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Laporan BOS belum tertib; serta
- d) Dinas Pendidikan belum sepenuhnya melakukan monitoring atas penggunaan dana BOS.

Pemprov Banten dan delapan pemerintah delapan kabupaten/kota di Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (22/5). Meski demikian, sembilan entitas itu memiliki catatan yang hampir sama terkait pengelolaan belanja bantuan operasional sekolah (BOS) yang belum tertib. Meski meraih opini WTP namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah berkaitan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pengelolaan belanja dana BOS tidak sesuai ketentuan. Disebabkan besaran alokasi penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah tidak sesuai petunjuk teknis dana BOS Tahun 2018. Kemudian TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) belum memperhitungkan sisa dana BOS dalam penganggaran belanja dana BOS tahun anggaran 2018 (bantenraya.com dikutip tanggal 12/06/2019).

Terdapat fenomena yang terjadi di Kota Serang yaitu pada dinas pendidikan Kota Serang, Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan kepada Dinas Pendidikan Kota Serang agar berbenah terhadap pengelolaan dana pendidikan agar lebih transparan kepada masyarakat. Ade menuturkan bahwa informasi berkaitan dengan dana kependidikan masih belum sepenuhnya terbuka di Kota Serang. Komisi Informasi (KI) Banten mengkonformasi menangani terjadinya sengketa informasi mengenai dana pendidikan di sekolah di Kota Serang. Menurut Ade beberapa ada yang menyengketakan, mulai dari SD, SMA, SMP juga ada. Artinya Komisi Informasi (KI) secara kelembagaan sejalan dengan KPK, karena di Kota Serang ini

Fauzan Fadhlurrahman, 2019

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana BOS di Kota Serang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

belum terbuka tentang dana kependidikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sekolah dan dinas pendidikan terkait transparan yaitu antara lain penerimaan peserta didik baru dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) (kabar-banten.com dikutip tanggal 19/3/2019).

Menurut fenomena-fenomena yang telah dijabarkan tersebut sekolah sebagai lembaga pemerintah yang melayani masyarakat dibidang pendidikan tentunya membutuhkan Sistem Pengendalian Intern. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa "Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik". Itu artinya apabila suatu lembaga pemerintahan terutama lembaga pendidikan yang mengelola dana pendidikan kurang dalam melaporkan, monitoring, dan mengevaluasi optimalisasi pengendalian intern masih kurang baik.

Menurut Emilda (2014) Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Pada fenomena yang terjadi di Kota Serang dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pada pengelolaan dana pendidikan atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih kurang, disebabkan kurangnya penerapan transparansi kepada pemakai terutama terhadap masyarakat agar dapat dipahami dan dinilai. Untuk itu diperlukan pengendalian intern agar dapat dievaluasi kualitas laporan keuangan pada tiap sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Fauzan Fadhlurrahman, 2019

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana BOS di Kota Serang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Tuti Herawati (2014) Menunjukkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya yaitu oleh Anggraeni S.M, Sahmin N, Lukman P (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kab.Gorontalo Utara. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada sampel penelitian yang mana kebanyakan penelitian terdahulu penelitiannya dilakukan pada SKPD bukan pada sekolah-sekolah pada suatu daerah.

Sekolah-sekolah yang ada di Kota Serang merupakan institusi pendidikan yang sangat berperan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun kualitas laporan keuangan pada institusi pendidikan tersebut masih belum terealisasi dengan baik karena adanya sengketa informasi menurut fenomena yang ada. Berdasarkan uraian diatas penulis akan meneliti dengan judul penelitian **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana BOS di Kota Serang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah dibawah ini yaitu :

- 1) Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama negeri dan swasta Kota Serang ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama negeri dan swasta di Kota Serang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan bagi penulis dan pembaca yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan umum tentang pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan dalam bidang akuntansi terutama pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan pada pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu akuntansi dengan teori-teori serta literature-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya khususnya pada instansi atau organisasi publik.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Manfaat Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi pemerintah baik itu pada tingkat pusat maupun daerah untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan terutama pada kebijakan mengenai dana BOS.
 - b. Manfaat Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi peneliti mengenai sistem pengendalian intern dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah dan juga menambah wawasan kepada

Fauzan Fadhlurrahman, 2019

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana BOS di Kota Serang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peneliti lain mengenai kualitas laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri maupun swasta yang menerima dana BOS.

c. Bagi Pihak Lainnya

Dapat memperoleh masukan yang diharapkan dapat memperkaya ilmu akuntansi, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis.